

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA
DESA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT
DI DESA JATI KESUMA KECAMATAN
NAMORAMBE**

SKRIPSI

**OLEH:
PARULIAN SINAGA
188330180**



**PROGRAM STUDI PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/25

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA
DESA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT
DI DESA JATI KESUMA KECAMATAN
NAMORAMBE**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area



Oleh:

**PARULIAN SINAGA
188330180**

**PROGRAM STUDI PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/25


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe
Nama : Parulian Sinaga
NPM : 188330180
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pemanding


(Aditya Amanda Panj, SE, M.Si)

Pembimbing


(Sari Nuzullina Rahmahani, SE, M.Acc, Ak.)

Pemanding

Mengetahui :


(Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan


(Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 3 Mei 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/25

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe”** yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain ditulis kan sumber nya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain nya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan



Parulian Sinaga
NPM. 188330180

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Parulian Sinaga
NPM : 188330180
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasi kan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023
Yang Menyatakan,

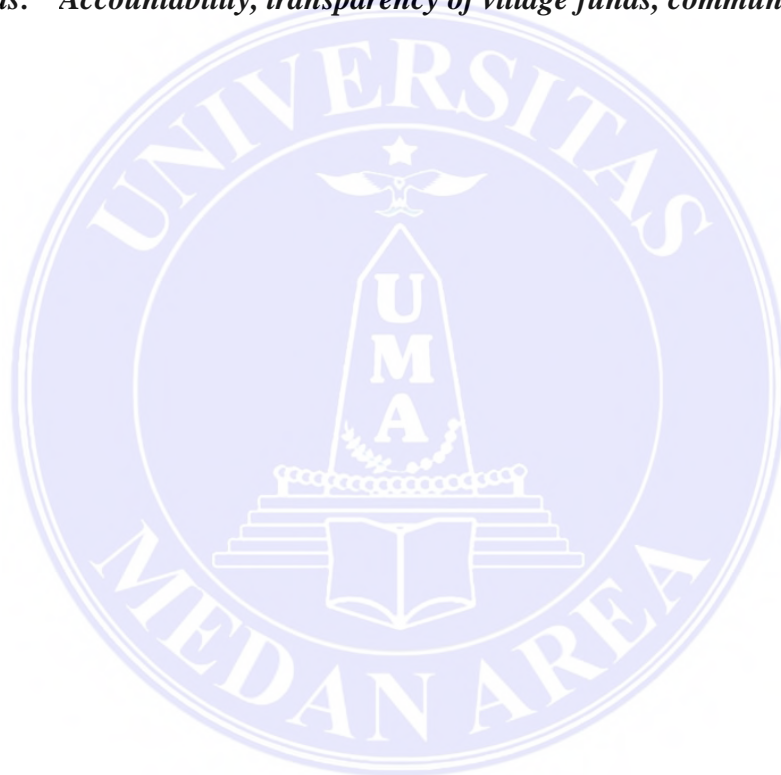


(Parulian Sinaga)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of accountability and transparency of village funds on community trust in Jati Kesuma Village, Namorambe District. The type of research used in this research is associative research. The type of data used in this study is quantitative with a population of 36 people. The sample in this study amounted to 30 respondents and the sample selection method used purposive sampling method. The results of this study indicate that accountability and transparency of village funds have a significant positive effect on community trust in Jati Kesuma Village, Namorambe sub-district.

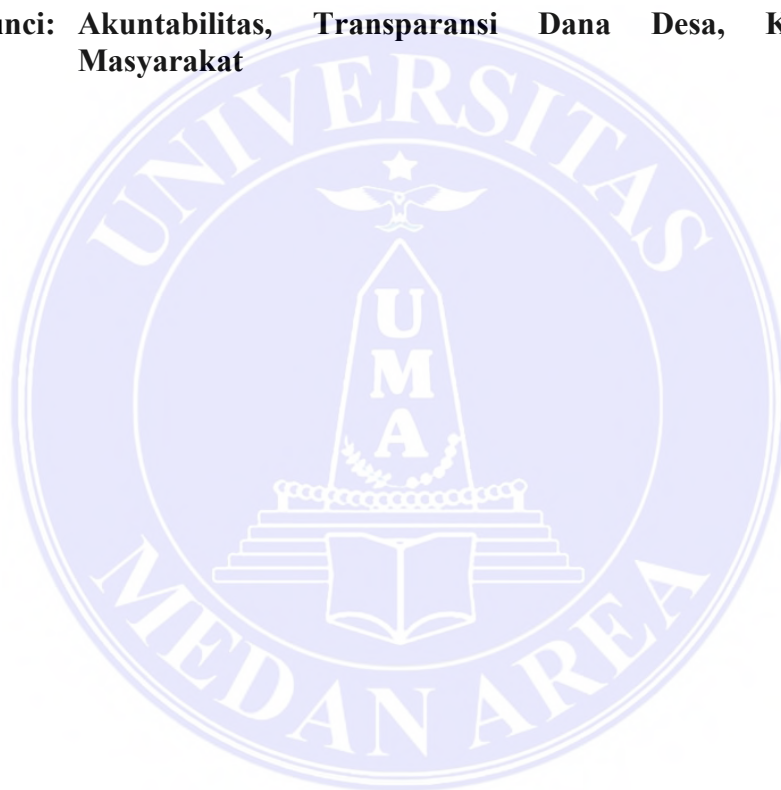
Keywords: *Accountability, transparency of village funds, community trust*



ABSTRAK

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di desa jati kesuma kecamatan Namorambe. Jenis penilitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah penelitian asosiatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitaif dengan jumlah populasi sebanyak 36 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 responden dan metode pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi Dana Desa, Kepercayaan Masyarakat



RIWAYAT HIDUP



Nama	Parulian Sinaga
NPM	188330180
Tempat, Tanggal Lahir	Tanjungbalai, 09 Mei 2000
Nama Orang Tua :	
Ayah	Tuama Sinaga
Ibu	Teresia Turnip
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP SWASTA TRITUNGGAL TANJUNGBALAI
SMA/SMK	SMA SWASTA SANTO THOMAS 2 MEDAN
Riwayat Studi di UMA	
Pengalaman Pekerjaan	-
No. HP/WA	0895712390008
Email	parulian.5n9@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe” sebagaimana syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Medan Area.

Penulis memahami tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

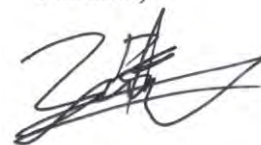
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Si, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman S.Pd., M.Ak, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Kedua orang tua penulis yakni bapak Tuama Sinaga dan ibu Teresia Br.Turnip yang selalu memberikan motivasi nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.
5. Ibu Aditya Amanda Pane, S.E, M.Ak, selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta banyak memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Sari Nuzullina Ramadhani, S.Ak, M.Acc, selaku dosen Pembanding yang telah memberikan masukan kritik dan saran selama seminar berlangsung yang komunikatif dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Fauziah Rahman S.Pd, M.Ak, selaku dosen sekretaris yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam setiap urusan berhubungan dengan skripsi ini.
8. Kepada teman satu kontrakan saya para Beban Kebanggaan Keluarga, Linus Semar Sinuhaji, Richardo Simangunsong, S.AK, Awiranda Zega, juga kepada Abang Alfriado Leonard Noprian Doloksaribu, S.Ak, Klinton Anois Silitonga, S.Ak yang menemani sebagai penyemangat dalam menyelesaikan skripsi dan sudah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada seluruh Teman-teman seperjuangan di Akuntansi A4 2018 yang telah saling mendukung selama ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam susunan kata, kalimat pembahasan dan penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Akhir kata peneliti berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca lainnya.

Medan, 10 Febuari 2023
Peneliti,



Parulian Sinaga
NIM.188330180

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	11
2.2 Teori Stewardship.....	12
2.3. Konsep Akuntabilitas	13
2.3.1 Pengertian Akuntabilitas	13
2.3.2. Macam-Macam Akuntabilitas.....	16
2.3.3. Dimensi Akuntabilitas	17
2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas	18
2.3.5 Indikator Akuntabilitas	19
2.4. Konsep Transparansi	20
2.4.1. Pengertian Transparansi.....	20
2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi.....	23
2.4.3 Indikator Transparansi	23

2.5.	Kepercayaan Masyarakat.....	24
2.5.1.	Pengertian Kepercayaan	24
2.5.2.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan.....	26
2.5.3	Indikator Kepercayaan Masyarakat.....	28
2.5.4	Prinsip Kepercayaan Masyarakat dalam Akuntabilitas dan Transparansi.....	30
2.6.	Kerangka Konseptual	32
2.7.	Hipotesis Penelitian	33
2.7.1.	Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat	33
2.7.2.	Pengaruh Transparansi Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat.....	34
2.7.3.	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat.....	35
BAB III	METODE PENELITIAN	36
3.1	Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.1.1	Jenis Penelitian	36
3.1.2	Lokasi Penelitian.....	36
3.1.3	Waktu Penelitian	36
3.2	Populasi dan Sampel	37
3.2.1	Populasi Penelitian.....	37
3.2.2	Sampel Penelitian.....	37
3.3.	Definisi Operasional.....	38
3.4	Jenis dan Sumber Data	39
3.4.1.	Jenis Data	39
3.4.2.	Sumber Data	39
3.5	Teknik Pengumpulan Data	40
3.6.	Teknik Analisis Data	40

3.6.1	Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif	41
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	41
3.6.2.1	Uji Validitas	41
3.6.2.2	Uji Reliabilitas	42
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.6.3.1	Uji Normalitas.....	42
3.6.3.2	Uji Multikolinearitas	43
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	43
3.6.4	Teknik Analisis Regresi Linear Berganda	44
3.6.5.	Uji Hipotesis	45
3.6.6.1	Uji Statistik t (Parsial).....	45
3.6.6.2	Uji Statistik f (simultan).....	45
3.6.6.3	Uji Koefisien Determinasi R^2	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN	47
4.1	Hasil Penelitian.....	47
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.1.1.1	Desa Jati Kesuma.....	47
4.1.1.2.	Struktur Organisasi Desa Jati Kesuma.....	48
4.1.1.3.	Visi Desa Jati Kesuma	49
4.1.1.4.	Misi Desa Jati Kesuma.....	49
4.1.2.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	49
4.1.2.1.	Deskripsi Responden.....	49
4.1.2.2.	Uji Statistik	50
4.2.	Pembahasan	64
4.2.1.	Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat	64

4.2.2. Pengaruh Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat	65
4.2.3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Secara Simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Dana Desa 2019-2021	2
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	31
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	36
Tabel 3.2 Tabel Sampel Penelitan.....	38
Tabel 4. 1 Deskripsi Jenis Kelamin Responden.....	49
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Akuntanbilitas	50
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Transparansi Dana Desa.....	51
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Kepercayaan Masyarakat	51
Tabel 4. 5 Uji Reliabilitas	52
Tabel 4. 6 Deskripsi Responden Akuntabilitas	53
Tabel 4. 7 Deskripsi Jawaban Transparansi Dana Desa	54
Tabel 4. 8 Deskripsi Jawaban Kepercayaan Masyarakat	56
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas	58
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4. 11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	60
Tabel 4. 13 Hasil Uji F	63
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4. 1 struktur organisasi	48
Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	77
Lampiran 2 Hasil Uji Statistik.....	85
Lampiran 3 Kuesioner.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu langkah yang paling penting dalam menangani masalah kemiskinan adalah peningkatan kapasitas produksi perekonomian terutama di desa. Salah satu upaya yang paling penting untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat adalah peningkatan kapasitas produksi agregat perekonomian melalui penambahan input dan perbaikan efisiensi. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, paling tidak dibutuhkan modal dan tenaga kerja (Sirait, 2021).

Menurut data Direktorat Jenderal perimbangan dan keuangan (2017: 2) Pemerintah Indonesia mulai mengalokasikan dana untuk desa. Dana tersebut disebut sebagai dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dalam pengalokasian dan desa, pengelola dituntut untuk dapat memenuhi syarat-syarat tata kelola yang baik (*good governance*).

Secara Nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk program dan kebijakan yang baru.

Tabel 1.1
Tabel Dana Desa 2019-2021

Tahun	Dana Desa
2019	Rp. 69,80 Triliun
2020	Rp. 72,20 Triliun
2021	Rp. 71,85 Triliun

Sumber: Kemenkeu 2021

Menurut Sirait (2021) untuk mengukur keberhasilan penyaluran dana desa, ada beberapa parameter yang dapat digunakan, antara lain angka kemiskinan di pedesaan, angka kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan, koefisien gini di pedesaan, serta nilai tukar petani dan nelayan di pedesaan. Hal ini bertujuan untuk mencoba melihat apakah dana desa telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan ekonomi dan pemerataan di pedesaan dalam lima tahun terakhir.

Berikut pemanfaatan dana desa selama periode tahun 2019-2020:

Keterangan	2019	2020
Penurunan jumlah penduduk miskin	22,89 jt jiwa	16,93 jt jiwa
Persentase penduduk miskin	14,09%	12,60%
Jumlah desa berstatus desa mandiri	203 desa	824 desa
Jumlah desa tertinggal	41.315 desa	27423 desa

Sumber: Kemendes PDT 2020

Di tahun 2020, pemanfaatan dana desa ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antar desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Sumber: djpb.kemenkeu.go.id). Sebagai respons penanganan pandemi Covid-19, dana desa tahun 2020 diprioritaskan untuk pembiayaan jaringan pengaman sosial berupa

bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa yang terdampak dan kegiatan penanganan Covid-19 di desa (Sirait, 2021).

Menurut Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, momentum dana desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 7.496 desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 5.000 desa pada tahun 2021. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah desa mandiri sebanyak 5.608 dari 73.709 atau 6,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 47,57% (Kemendes PDT, 2021).

Berdasarkan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2022, dana desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu reguler dan mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran dana desa reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: tahap I (40 persen) bulan Januari; tahap II (40 persen) bulan Maret; dan tahap III (20 persen) bulan Juni. Sementara, penyaluran dana desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap I (60 persen) bulan Januari; dan tahap II (40 persen) bulan Maret. Realisasi penyaluran secara reguler per 10 Januari 2022 sebesar Rp46,12 triliun (73.198 desa), sedangkan secara mandiri sebesar Rp1,37 triliun (1.741 desa). Selain itu, di masa pandemi COVID-19, Dana Desa juga disalurkan untuk penanganan COVID-19 berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan

Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 telah menetapkan alokasi dana desa untuk penanganan COVID-19 minimal sebesar 8 persen dari total dana desa. Total pagu alokasi dana desa untuk penanganan COVID-19 Tahun 2021 per 10 Januari 2022 sebesar Rp5,76 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,12 T pada 53.973 desa (Kemendes PDT, 2021).

Dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang diharapkan mampu menahan laju peningkatan jumlah penduduk miskin pedesaan. Total pagu alokasi BLT-DD 2021 per 10 Januari 2022 sebesar Rp28,80 triliun dengan realisasi sebesar Rp20,24 triliun pada 67.473.752. Prioritas penggunaan dana desa menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang disusun berdasarkan data yang disediakan oleh Kemendes PDTT dan aspirasi masyarakat desa. RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes (Kemendes PDT, 2021).

Berkaitan dengan uraian-uraian di atas, bahwa dalam pelaksanaannya, penyaluran dana desa tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi pada desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan berita dalam hari Tribun News, pada tanggal 28 November 2021, Kepala desa Jati Kesuma dilaporkan ke polisi atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi dana bantuan Covid-19. Kasus ini dilaporkan oleh Sayful yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan di Desa Jatikesuma. Dalam laporannya Syaiful mengatakan bahwa kepala desan Jati Kesuma Panggung Warsito, menyalahgunakan wewenangnya karena menetapkan perangkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian melakukan pemungutan kepada aparat desa

untuk perpanjang SK dengan biaya yang tidak wajar yaitu berkisar satu juta per orang dan melakukan pungutan liar terhadap masyarakat untuk membuat surat tanah yang harus bayar jutaan karena ada yang masyarakat membayar sampai lima juta rupiah.

Berkaitan dengan fenomena dan fakta di atas, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. (Tribunnews.com)

Pada kasus di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ini, terlihat indikasi bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa tidak memperlihatkan adanya akuntabilitas dan transparansi khususnya dalam pengelolaan dana desa, sehingga perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintahan yang tidak transparan akan mengakibatkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara langsung dalam mengambil kebijakan. Salah unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas (Sedarmayanti, 2017: 67).

Menurut Juanda (2019 : 27) untuk mencapai kepercayaan masyarakat maka salah satu cara yang dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan dan laporan kinerja untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Apabila pemerintahan tidak akuntabel dan transparan, maka akan menimbulkan

dampak negatif kepada masyarakat, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa juga dimaksudkan untuk pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa dan partisipasi masyarakat adalah proses ketika masyarakat sebagai individu atau kelompok sosial yang mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Julianto dan Dewi, 2019)

Akuntabilitas keuangan berinisiatif menyusun petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Debi (2015) menyatakan Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau. Pengelolaan dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparat desa bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* diantaranya Akuntabilitas, transparansi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat di desa (Setyawati, 2020).

Menurut Basri, (2022) disebutkan bahwa Akuntabilitas (accountability) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda beda. Jadi, Akuntabilitas

pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

Menurut Sofyani dan Tahar (2021 : 78) mengatakan transparansi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat desa. Sedangkan menurut Apriana, Isna (2019) mengatakan bahwa akuntabilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan dana desa. Secara bersamaan akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Talang Kabun. Septiviasuti (2019:67) mengatakan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan di Kabupaten Ponorogo, partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Ponorogo. Pengelolaan dana desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe?
2. Apakah Transparansi Dana Desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe?
3. Apakah Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa berpengaruh secara bersamaan terhadap kepercayaan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa berpengaruh secara bersamaan terhadap kepercayaan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Desa

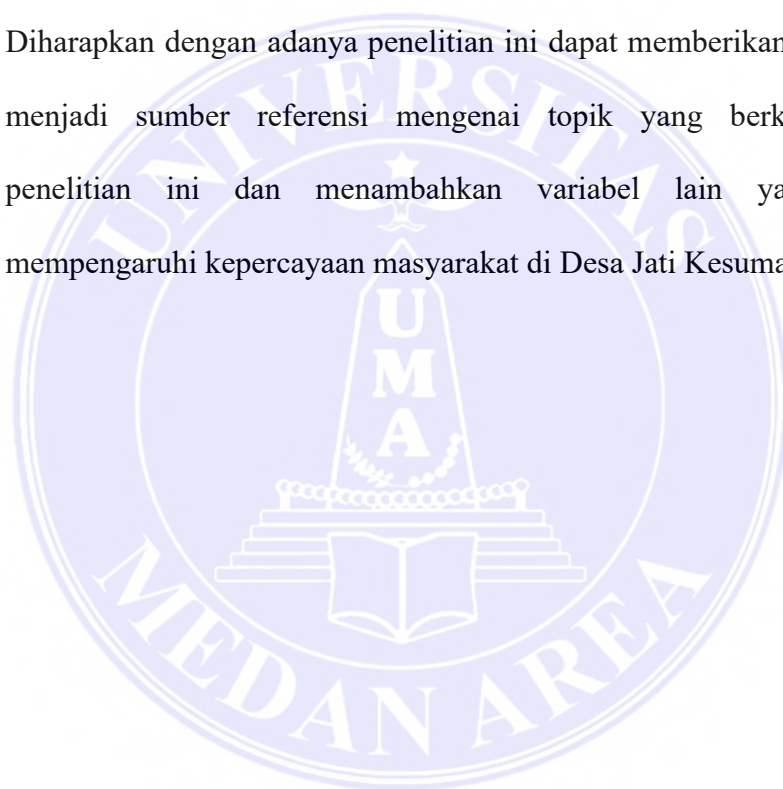
Untuk menjadi referensi dan menjadi pertimbangan untuk lebih memperbaiki aktivitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi sumber referensi mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dan menambahkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi kepercayaan masyarakat di Desa Jati Kesuma.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency Theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (Lutfhi 2018).

Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*. Berdasar *Agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya

information asymmetry maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Luthfi 2018).

2.2 Teori Stewardship

Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan teori *Stewardship*. Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak terpengaruh pada tujuan-tujuan individu namun lebih fokus pada sasaran utama dalam kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Menurut Jannah (2016) teori *stewardship* merupakan suatu keadaan dimana manajer sebagai *steward* lebih fokus untuk mewujudkan keinginan bersama dan tujuan organisasi tidak pada keinginan sendiri. Teori tersebut berspekulasi bahwa antara kesuksesan dan kepuasan organisasi memiliki kaitan yang kuat.

Teori *stewardship* dapat digunakan pada penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pada pemerintahan (Dewi, 2020). Yang mana mulai dari perkembangannya, akuntansi sektor publik telah direncanakan untuk mencukupi informasi dalam hubungan antara *steward* dan *principals*. Dimana pemerintah desa berperan sebagai *steward*, sedangkan masyarakat berperan sebagai *principal* yang memiliki dana. Hubungan teori *stewardship* dengan sektor publik yaitu pemerintah desa dinilai dapat bertanggungjawab dan dapat dipercaya dalam pekerjaannya untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap publik. Pemerintah desa lebih sering berperan sebagai *steward* karena dituntut oleh jenis layanan yang diberikan, jenis insentif dan sanksi yang digunakan, tingkat kapasitas manajemen publik dan frekuensi informasi yang digunakan (Slyke, 2007). Dengan demikian diharapkan teori dapat menjelaskan bahwasanya pemerintahan desa sebagai *steward* yang bekerja dan melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat desa

saja (Siregar, 2021). Dengan demikian segala keputusan dalam perencanaan bertujuan untuk fokus terhadap pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah selalu berupaya agar masyarakat tidak kecewa sebagai *principals* dalam mencapai tujuan organisasi (Siregar, 2021).

Teori *stewardship* jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat diharapkan pemerintah desa dapat mengelola dana desa melalui keputusan yang diambil dari dua belah pihak yang digabungkan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk tujuan organisasi pemerintahan sehingga keinginan bersama dapat tercapai. Hal itu juga mendukung rasa kepercayaan masyarakat yang meningkat dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.

2.3. Konsep Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu syarat terlaksananya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas pada umumnya dikaitkan pada proses pertanggungjawaban serangkaian bentuk pelayanan yang diberikan atau yang telah dilakukan. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat (Risnawati, 2021)

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi

amanah tersebut (Mardiasmo 2018: 72). Senada dengan yang dikemukakan menurut Kuswanti, (2020). Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban.

Sementara itu, Mardiasmo (2018:65) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan menurut Nafidah dan Suryaningtyas (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas menjadi komitmen pemerintah provinsi untuk mewakili penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan kemerdekaan wilayah untuk menggapai maksud dan tujuan yang disepakati bersama dengan cara mempertanggungjawabkan semua kegiatan dengan cara yang terukur, baik kualitas kegiatannya maupun kuantitasnya.

Menurut Mardiasmo (2018:40) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas terdiri dari dua macam menurut yaitu akuntabilitas *vertical* dan akuntabilitas *horizontal*. Dimana akuntabilitas *vertical* adalah akuntabilitas yang dilakukan lembaga Negara kepada warga Negara baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan akuntabilitas *horizontal* adalah akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga Negara kepada lembaga akuntabilitas yang dibentuk lingkungan internal Negara sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas mencakup kewajiban melaporkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Ini berarti bahwa segala tindakan pemerintah harus memperoleh pengawasan dari masyarakat.

Menurut Aziz, (2019) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yaitu :

1. Kompetensi sumberdaya manusia

Kompetensi sumberdaya sangat diperlukan, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia. Untuk mendapatkan kompetensi aparatur yang berkualitas tidak hanya dari pengalaman tetapi juga perlu adanya pelatihan. Pentingnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelolaan keuangan desa akan mempengaruhi kualitas akuntabilitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Tentunya aparatur yang dapat mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atas dana yang diberikan.

2. Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi secara merata tidak hanya digunakan oleh pebisnis tetapi juga pemerintahan untuk membantu mengadministrasikan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Penggunaan teknologi informasi ini memiliki keunggulan yaitu meningkatkan keakuratan dan ketepatan informasi dan mengurangi kesalahan (Aziz, 2019:55).

Akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

2.3.2. Macam-Macam Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada

pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).

Dalam Adiwirya, (2015) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan suatu aktivitas, adanya pemberian keleluasaan (diskresi) dan adanya pemberian kewenangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*), bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (*vertical accountability*).

2.3.3. Dimensi Akuntabilitas

Suatu organisasi publik dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi empat dimensi akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2018) Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan sudah cukup baik atau belum dalam menjalankan tugas, yang meliputi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya markup dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

c. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan sudah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

2.3.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Menurut Irawati (2019: 57) Akuntabilitas kinerja dipengaruhi banyak hal, diantaranya adalah :

1. Penerapan akuntansi public

2. Kualitas peraturan perundangan serta ketaatan pada peraturan perundangan itu sendiri
3. Kualitas laporan keuangan
4. Standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan
5. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan
6. Kompetensi aparatur pemerintah daerah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan.

Keberhasilan akuntabilitas keuangan desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa serta responsive terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas keuangan desa membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif (Fadhilah 2019 : 18).

2.3.5. Indikator Akuntabilitas

Krina (2019) Mengatakan akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Adapun indikator Akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu:

1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil

sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
4. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

2.4. Konsep Transparansi

2.4.1. Pengertian Transparansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015 : 1209) transparansi adalah kenyataan dan kejelasan . Sedangkan menurut Wahyudin (2020:49) transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan

masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik

Erwin (2020:52) mengatakan adanya transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik. Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk, dan menciptakan iklim investigasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha.

Menurut Alfi (2017:22) menyampaikan bahwa transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.

Menurut Zeithaml dan Berry (2019:44) dalam melaksanakan kualitas pelayanannya penyelenggaraan pelayanan publik secara umum didasarkan pada filosofi dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Maksud ditetapkan Keputusan tersebut adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi, serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Hidayat, (2019:35) Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Menurut Hidayat (2019:39) transparansi dibangun dalam suasana adanya aliran informasi yang bebas. Dalam suasana ini, proses, institusi, dan informasi dapat secara langsung di akses oleh mereka yang berkepentingan. Di samping itu, juga tersedia cukup informasi untuk memahami dan memonitor ketiga hal itu. Menurut Riswandha dalam Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan *Good Governance*. Dalam jurnal otonomi daerah menyebutkan bahwa transparansi adalah rakyat paham akan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, transparansi itu berarti bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan (Herianti & Arifin 2020:77).

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi

Menurut Putra (2017 : 339) transparansi dana desa di pengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kebijakan
2. Regulasi
3. Program
4. Anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik

2.4.3 Indikator Transparansi

Menurut Adrianto (2018) transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu :

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
 - c. Adanya basis legal untuk pajak.
 - d. Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 - e. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 - a. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran).

- b. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
 - c. Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang (BPK RI)
 - d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.
 - e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
3. Adanya audit yang independen dan efektif.
- a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
 - b. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - c. Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
 - d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
 - e. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - f. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

2.5 Kepercayaan Masyarakat

2.5.1 Pengertian Kepercayaan

Menurut Ramayuniarti (2017: 27) menyatakan kepercayaan, sikap dan perilaku memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketiganya saling mempengaruhi, yang mana kepercayaan akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap. Sikap seringkali akan membentuk perilaku seseorang. Tsalis (2017:124) mendefinisikan kepercayaan (*trust*) adalah perilaku individu, yang mengharapkan seseorang agar memberi manfaat positif.

Adanya kepercayaan karena individu yang di percaya akan memberi manfaat dan melakukan apa yang diinginkan oleh individu yang memberi kepercayaan. Sehingga, kepercayaan menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama.

Adapun menurut Romdhon (2020) kepercayaan adalah sebagai anggapan bahwa setiap orang tidak bermaksud negative kepada dirinya. Sejalan dengan kepercayaan menurut Dasgupta (1988) dalam Romdhon (2020) menyatakan kepercayaan adalah suatu sikap untuk mempercayai individu dan kelompok dengan tingkatan tertentu yang saling berhubungan. Pada tingkat individu, anda mempercayai seseorang individu untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang anda ketahui tentangnya, diposisi kemampuannya, reputasi dan tidak hanya karena dia hanya bilang dia ingin melakukannya. Pada tingkat kolektif, jika anda tidak percaya dalam suatu badan atau organisasi dengan mana individu berafiliasi, dan tidak akan percaya padanya untuk membuat kesepakatan atau kerja sama.

Menurut Mayer (1995) dalam Tsaltis (2017) menjelaskan kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk peka terhadap tindakan orang lain berdasarkan pada harapan bahwa orang lain akan melakukan tindakan tertentu pada orang yang mempercayainya. Lebih lanjut menurut Moordiningsih (2010) dalam Tsalist (2017) mengemukakan bahwa membangun kepercayaan kepada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Kepercayaan terbentuk melalui rangkaian perilaku antara orang yang memberikan kepercayaan dan orang yang dipercayai tersebut. Kepercayaan muncul dari pengalaman dua pihak yang sebelumnya bekerja sama atau berkolaborasi dalam sebuah kegiatan atau kolaborasi. Pengalaman ini memberikan kesan kepada kedua belah pihak sehingga mereka

saling mempercayai dan tidak berkhianat, yang dengan itu dapat merusak komitmen. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan individu akan kebaikan individu atau kelompok lain dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan bersama.

2.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan

Menurut Juanda (2018 : 23) Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditopang beberapa pilar sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun di atas kepercayaan masyarakat bahwa mereka telah diberi kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas berpartisipasi secara konstruktif, hanya dengan partisipasi merasa memiliki kepercayaan diri untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan, pada sisi lain dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memberi legitimasi kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang kredibel.

2. Penegakan Hukum

Pelaksanaan pemerintahan yang baik juga harus ditata oleh sebuah sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian, kepercayaan dapat terbangun apabila ada penegakan hukum yang konsisten dan non

diskriminatif, sebaliknya kepercayaan kepada pemerintah pudar jika hukum tidak dapat ditegakkan dan hukum bersifat diskriminatif.

3. Transparansi

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini adalah kepercayaan yang diperintah terhadap pemerintah sebagai output. Maksudnya di sini adalah yang diperintah percaya kepada pemerintah karena bukti bukan janji. Kepercayaan tersebut timbul karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan. Kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji kepada orang lain atau diri sendiri tersebut adalah tanggung jawab. Pemerintah yang bertanggungjawab adalah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada warganya.

4. Responsif

Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat-nya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Sesuai dengan asas responsif, maka setiap unsur pemerintah harus memiliki etik yakni etik individual menuntut mereka agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Sedang etik sosial menuntut mereka agar memiliki sentifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

5. Kesenjangan dan Keadilan

Tidak ada seorang atau sekelompok orangpun yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Pola pengelolaan pemerintahan membutuhkan kejujuran dan keadilan yang melahirkan kepercayaan dan memperoleh legitimasi yang kuat dari publik dan akan memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat. Kesenjangan dan keadilan dalam pemilihan pelayanan publik berkorelasi positif dalam membangun kepercayaan semua unsur *Governance*.

6. Akuntabilitas

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kemenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ia diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya.

Akuntabilitas sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kepercayaan..

2.5.3 Indikator Kepercayaan Masyarakat

Menurut Romdhon (2020) Terdapat empat elemen yang diperlukan untuk kepercayaan seseorang terhadap organisasi, seperti dijelaskan berikut ini :

1. *Exhibiting Trust*

Tujuan dilakukannya pengukuran tingkat exhibiting trust yaitu untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang sekarang sudah ada (*currently exist*) pada suatu tim atau suatu organisasi.

2. *Achieving Results*

Elemen kedua yang penting dan mendesak untuk meraih kepercayaan dalam dunia bisnis atau terlebih lagi dalam setiap keadaan yang menuntut adanya tindakan dan hasil adalah melibatkan kinerja seseorang dalam memenuhi kewajiban dan komitmen. Agar iklim kepercayaan tetap ada, setiap orang perlu memperhitungkan kesuksesan dan kemampuan bertahan perusahaan. Setiap orang dalam organisasi juga harus mampu mempertahankan hasil sesuai dengan komitmen yang telah dijanjikan.

3. *Acting With Integrity*

Integritas artinya jujur dalam perkataan dan konsisten dalam tindakan. Konsistensi merupakan dasar dari integritas. Terdapat empat tipe konsistensi, yang harus dicermati untuk memenangkan atau meraih kepercayaan orang lain, yaitu:

- a. Sesuatu yang diungkapkan kepada orang lain mencerminkan apa yang diketahui
- b. Perkataan harus sesuai dengan perilaku
- c. Perilaku yang konsisten terhadap segala situasi
- d. Perilaku yang konsisten dengan berjalannya waktu

Prinsip-prinsip berikut ini sangat diperlukan untuk membantu perkembangan integritas dan perilaku yang konsisten dalam suatu organisasi, yaitu:

- a. Menetapkan strategi dengan jelas
- b. Mempunyai agenda yang terbuka
- c. Mengakui adanya permasalahan
- d. Memperjelas dan melanjutkan komitmen

4. *Demonstrating Concern*

Pada tingkatan dasar, seorang individu akan mempercayai orang lain yang peduli kepadanya. Untuk percaya kepada orang lain atau suatu organisasi, setiap orang merasa perlu bahwa orang lain atau suatu organisasi tersebut mau mendengar dan menanggapi kepentingannya.

2.5.4 Prinsip Kepercayaan Masyarakat dalam Akuntabilitas dan Transparansi

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan Juanda (2018) yaitu :

1. Profesionalitas yaitu meningkatkan kemampuan dan moral dalam penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas yaitu meningkatkan pertanggungjawaban para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

3. Trasparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Demokrasi dan partisipasi yaitu mendorong setiap warga Negara untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Efisiensi dan dan efektivitas yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
6. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hokum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

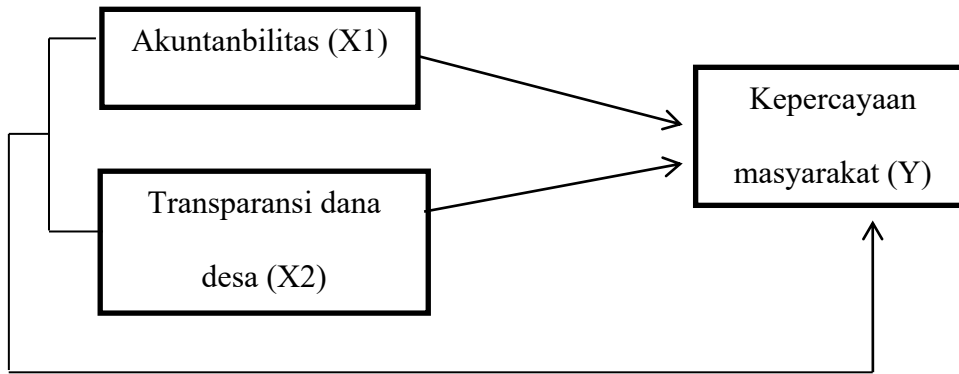
Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama/tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Apriliana Isna, 2019	Determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa meskipun penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh. akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. transparansi tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat
2	Norni Octavia, 2020	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun	Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: Variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat di desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

		Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma	
3	Susliyanti Eni Dwi dan Binawati Enita, 2020	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat (H1a dan H1b ditolak), Akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, Akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat., dan Kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.
4	Sofyani Hafiez dan Tahar Afrizal, 2021	Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat desa terkait dengan transparansi, namun tidak dengan akuntabilitas. Karena studi dan literatur tentang pemerintahan desa masih terbatas, hasil studi ini memberikan wawasan kepada khasanah pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang signifikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5	Basri Irmawati, 2022	Good Governance Akuntansi Dana Desa Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Wiwitan Timur)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good governance dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat, maka dapat diberikan kesimpulan good governance mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada Desa Wiwitan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik good governance maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat pada Desa Wiwitan Timur.

2.6. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan maka kerangka konseptual dalam penilitan ini adalah adanya pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat secara parsial dan simultan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat yaitu akuntabilitas dan transparansi yang secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Menurut Nurni (2020) Akutabilitas adalah kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak ada pejabat atasannya. Sehingga dengan adanya akutabilitas yang dilakukan pemerintah dapat memberikan kepercayaan dari masyarakat atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang sudah dilakukan. Bukti menunjukkan bahwa ketika perubahan berhasil diterapkan dalam hubungan akuntabilitas antara pembuat kebijakan, penyedia dan konsumen memiliki berdampak pada kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian Apriliana (2019) dan Norni (2020) yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe

2.7.2 Pengaruh Transparansi Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat

Menurut Restufiani (2022) Transparansi merupakan keterbukaan yang diberikan oleh pemerintah desa atas laporan pengelolaan dana desa yang sudah digunakan untuk kegiatan desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya transparansi pengelolaan dana desa diharapkan masyarakat mengetahui apakah pengelolaan dana desa sudah digunakan sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jika pemerintah tidak melakukan transparansi masyarakat akan curiga dengan pemerintah desa karena tidak mengetahui digunakan untuk apa keuangan tersebut, sehingga bisa menimbulkan ketidakpercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi di buat agar menciptakan keadilan tanpa pandang bulu sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Hal ini didukung oleh penelitian Hafiez (2021) dan Norni (2020) yang menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

H₂ : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe

2.6.3 Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat dan pemerintah adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat memerlukan suatu bentuk pemerintahan dan sebaliknya pemerintah memerlukan masyarakat. Untuk membentuk suatu komponen masyarakat yang baik diperlukan pemerintahan yang baik dan untuk membentuk pemerintahan yang baik diperlukan peran serta masyarakat (Apriliana 2019)

Menurut Restufiani (2022) Akuntabilitas dan transparansi merupakan asas untuk melakukan pengelolaan dana desa yang sudah diatur dalam undang-undang. Dengan dilaksanakannya akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat menjadikan pemerintah Desa Jati Kesuma menjadi pemerintahan yang baik, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut.

Hal ini didukung oleh penelitian Debi , Septiviasuti (2019) dan Norni (2020) yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

H₃ : Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Yang bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun rencana waktu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Keterangan	2022-2023									
		Jan	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Feb	Mar	
1	Pengajuan Judul Skripsi										
2	Penyusunan Proposal										
3	Bimbingan Proposal										
4	Seminar Proposal										
5	Pengumpulan Data										
6	Analisis Data										
7	Penyusunan Dan Bimbingan Skripsi										
8	Seminar Hasil										
9	Sidang Meja Hijau										

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2023)

Lokasi penelitian berada di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2017) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di pemerintah desa Jati Kesuma, diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) . Sehingga total populasi penelitian ini adalah 30 orang.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah suatu bagian atau proporsi dari populasi tertentu yang menjadi kajian atau perhatian. Sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode *Purposive sampling* adalah penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan kepada kepentingan atau tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	BPH dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang	15
2	BPH dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.	5
3	BPH dan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang	10
Sehingga Total Responden		30

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang sudah dilakukan maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 responden.

3.3. Definisi Operasional

Tabel 3.1
Tabel Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Sekala Ukur
Akuntabilitas (X_1)	Akuntabilitas merupakan salah satu syarat terlaksananya tata pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	1. pembuatan keputusan di tulis secara tertulis 2. akurasi dan kelengkapan informasi 3. kejelasan dari sasaran kebijakan dan dikomunikasikan 4. penyebarluasan informasi melalui media masa dan akses public 5. sistem informasi manajemen dan monitoring hasil	Ordinal
Transparansi dana Desa (X_2)	transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik.	1.ada tidaknya kerangka kerja hukum 2. adanya akses masyarakat 3. adanya akses masyarakat 4. adanya audit yang independent dan efektif 5. adanya	Ordinal

		keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan danadesa	
Kepercayaan Masyarakat	Kepercayaan adalah perilaku individu, yang mengharapkan seseorang agar memberi manfaat positif.	1. <i>exhibiting trust</i> 2. <i>achieving result</i> 3. <i>acting with integrity</i> 4. <i>demonstration concern</i>	Ordinal

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

3.4.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder antara lain sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh penelitian dari hasil kuesioner (angket) dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Jatikesuma Kecamatan Namorambe.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data yang mendukung data primer dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kuesioner (angket). Kuesioner tersebut peneliti berikan kepada responden yang berada di Desa Jati Kesuma. Kuesioner dilengkapi dengan skala pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif. Skala likert digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi pegawai dan responden di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang tentang variabel akuntabilitas dan variabel kepercayaan. Kuisisioner yang diberikan kepada responden, dimana responden memilih salah satu jawaban yang telah disediakan dalam daftar tabel pertanyaan dengan menggunakan skala likert dengan bentuk checklist, dimana setiap pertanyaan memiliki 5 opsi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Skala Likert

No	Jawaban Responden	Bobot Jawaban responden
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang setuju	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

Sumber : data di olah penelitian, 2022

3.6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS 21.0 for Windows.

3.6.1 Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018), Analisis Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (jabatan, lama pengalaman kerja, keahlian khusus, latar belakang pendidikan).

Menurut Ghozali (2018), Analisis deskriptif ini dapat diuji dengan menggunakan statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maximum, minimum, dan standar deviasi, dan juga dapat dilihat dari klasifikasi masing-masing variabel.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data ada 2 jenis yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan reliabel dan valid.

3.6.2.1 Uji Validitas

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu dalam mengukur apa yang ingin diukur. (Siregar, 2021) Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur.

Menurut Ghozali (2018) dalam pelaksanaan uji validitas ini, dilaksanakan dengan melakukan korelasi Item Correlation dengan melihat hasil perhitungan pada kolom Corrected Item – Total Correlation. Hal tersebut sama dengan penghitungan menggunakan korelasi bivariate, karena keduanya menghitung hal

yang sama. Dalam uji ini, apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka hasil tersebut telah valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah proses olah data yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran data tetap konsisten (Siregar 2021). Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban dari responden terhadap pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, uji reliabilitas ini dilakukan sebagai alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Secara umum, instrument penelitian dikatakan reliable jika mempunyai koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,6$. Jika nilai *Cronbach's Alpha* yang didapat dari masing-masing variabel adalah $> 0,6$ maka variabel-variabel tersebut dikatakan reliable. (Siregar, 2021)

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran data yang dianalisis. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Menurut Ghozali (2018), untuk melihat normalitas residual, analisis grafik ini dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Sedangkan analisis statistiknya menggunakan one sample Kolmogorof-Smirnov Test. Normalitas suatu data dapat dilihat jika data terdistribusi dengan normal, yaitu dengan melihat angka differences dan juga angka signifikansinya. Jika angka signifikannya lebih dari 5 %, maka model tersebut dikatakan telah normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Lubis (2017:94) Uji Multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya kolerasi yang tinggi antar variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linier berganda.

Metode pengujian yang digunakan untuk menguji multikolinearitas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Sebagai dasar acuan pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika nilai Tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka dapat diartikan bahwa terjadinya kemungkinan masalah multikolinearitas pada penelitian tersebut.
2. Jika nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada penelitian tersebut.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Lubis (2017: 91) Uji Heteroskedastisitas Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah apabila terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut juga dengan

homoskedastisitas. Untuk mengetahui adanya adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadinya heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Teknik Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2017: 192) Analisis regresi linear berganda dapat diartikan sebagai suatu regresi linear yang mempunyai suatu variabel dependen (variabel terikat) dengan dua atau lebih variabel independen (variabel bebas).

Adapun rumus permasalahan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e$$

Keterangan Rumus:

Y = Kepercayaan Masyarakat

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Transparansi dana desa

a = konstanta

b₁ dan b₂= koefisien regresi (kemiringan);

Analisis regresi dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan software SPSS 21.0 . hasil analisis regresi dapat digunakan pula untuk melakukan uji

hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Dasar pengambilan keputusannya, yaitu:

1. Jika nilai P value (sig) $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
2. Jika nilai p value (sig) $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3.6.5. Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Statistik t (Parsial)

Uji statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2017 : 67) cara pengujian uji statistik t yaitu sebagai berikut :

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak).
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

3.6.5.2 Uji Statistik f (simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama- sama apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2017: 70) Kriteria pengujian yang digunakan pada uji statistik F yaitu sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{table}$. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{table}$. Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi R^2

Menurut Sugiyono (2017: 74) uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi dari variabel dependen. Range nilai koefisien determinasi berada diantara 0-1, dan apabila nilai R^2 mendekati 0 berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen sangat terbatas. Apabila sebaliknya, R^2 mendekati 1 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen besar. Dapat juga dikatakan bahwa $R^2 = 0$, berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait, sedangkan $R^2 = 1$ menandakan bahwa suatu hubungan yang sempurna.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengujian data dalam penelitian ini dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Semakin baik akuntabilitas yang diterapkan maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.
3. Akuntabilitas dan transparansi dana desa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah desa diharapkan lebih giat lagi dalam menjalankan visi dan misi organisasi sehingga visi dan misi tercapai dengan maksimal. Selain itu diharapkan segera membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar pendapatan asli desa meningkat dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dari akuntabilitas dan transparansi dana desa

terhadap kepercayaan masyarakat di desa Jati Kesuma kecamatan Namorambe. Selain itu peneliti berharap pada peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat seperti alokasi dana desa, partisipasi masyarakat, dan kebijakan desa.

3. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman juga wawasan akan kepercayaan masyarakat, selain itu dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian.





DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, Muhammad Firdiansyah. 2015. Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *Jurnal: Akuntansi*. Vol 11 (2). Universitas Udayana, Bali.
- Alfi, Mohamad. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangkaraya). Skripsi: Insititut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya.
- Andrianto, Nico. 2018. Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government. *Jurnal Akuntansi*. Vol 2 (1). Yogyakarta.
- Apriliana, Isna. 2019. Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Journal Of Accounting and Finance Studies*, Vol 2 (2). Universitas Mataram.
- Arif, Widyatama, dkk. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), *Jurnal: BAKI*, Volume 2, Nomor 2, 2017
- Aziz, Muhammad Nur dan Sawitri Dwi Prastiti. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal: Akuntansi Aktual*. Vol 6 (2). Universitas Negeri Malang, Malang.
- Baiq, Nurrizkianan, dkk. 2017 Determinasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholder. *Jurnal: Akuntansi dan Investasi*, Vol 18 (1). Universitas Mataram, Mataram.
- Basri, Irmawati. 2022. *Good Governance* Akuntansi Dana Desa Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Wiwitan Timur). Skripsi Tesis. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Dewi, Filda Gean Rosiana dan Sapari. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal: Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 9 (5). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Surabaya.
- Erwin, Agus. 2020. Purwanto dan Dyah Ratih S. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Gava Media.
- Fadhilah, Fajri. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Lahat. Skripsi: Politeknik Sriwijaya, Palembang.

- Febby, Ramayuniarti. 2017 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Nasabah Pengguna Cash Deposit Machine (CDM) (Studi BNI Syariah Cabang Bengkulu)*, Skripsi : IAIN Bengkulu, Bengkulu.
- Getut, Pramesti. 2016. *Statistika Lengkap Secara Teori dan Aplikasi Dengan SPSS 23*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Herianti dan Arifin. 2020. Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa. *Jurnal : Akuntansi*. Vol 5 (2). Universitas Brawijaya, Malang.
- Hidayat, Ahmad. 2019. *Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta.
- Indra, Bastian. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, Loina Lalolo Krina P.2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Irawati Anik dan Caesar Agesta. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal: Akuntansi & Keuangan*. Vol 10 (1). Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung.
- Juanda, Nawawi. 2019. Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*. Yogyakarta.
- Julianto dan Dewi. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal: Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 9 (5).
- Krina, Loina Lalolo. 2019. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Kuswanti, Alfida Putri Eka. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat. Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masrizal. 2015. *Pengendalian Masalah Sosial melalui Kearifan Lokal*. Banda Aceh. Unsyah Press
- Miftahuddin. 2018. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus :DesaPanggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*, Skripsi: UIN Yogyakarta.

- Nafidah Lina Nasihatun dan Mawar Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal: Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol 3 (1).
- Norni, Octavia. 2020. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun. Skripsi Tesis. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu.
- Putra Putu Andi Suarjaya,dkk. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi*.Vol 8 (2). Universitas Pendidikan Ganesha, Bali.
- Ramayuniarti, Feby. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Nasabah Pengguna Cash Deposit Machine (CDM). Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu.
- Riant, Nugroho. 2014. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Alex Media Competindo.
- Risnawati. 2021. Akuntabiitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lolisang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Romodhon, Muhammad Rizqi Syarhri. 2020. Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Jurnal: Riset Akuntansi Keuangan*. Vol 2 (3). Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Sayogyo. 2017. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Yogyakarta. Aditya Media.
- Sedarmayanti, 2017. *Pengelolaan Dana Desa*. Cetakan kedua. Yogyakarta.
- Septiviasuti, Uni. 2018. Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Ponogoro.
- Setyawati, V Devina dam Ferdinand, Deograsias Yoseph Yustinianus. 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif. *E-Jurnal: Akuntansi dan Ekonomi FE UN PGRI Kediri Vol 5 (2)*. Kediri: Universitas Katolik Darma Cendika.
- Sirait, Robby Alexander. 2021. Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020. Berkas: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI Maret.
- Siregar, Dicky Arpillo. 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Tesis: Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Sofyani Hafiez dan Tahar Afrizal. 2021. Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi Vold 4* (1). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2010 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Triyono, dkk. 2019. *The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District)*, *Jurnal: Riset Akuntansi Keuangan Indonesia*, Volume 4, No.2.
- Tsalis, AI. 2017. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan Nassisme. Skripsi. Universitas Lampung. Diakses pada tanggal 18 Maret 2022.
- Umami, R dan Nurodin, NI. 2017. "Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ilmu Administrasi*. Diakses pada tanggal 8 Februari 2022.
- Wahyudin Zarkasyi, 2020. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan*. *Jurnal: Alfabeta, Bandung*.
- Widiyanti, A. 2017..*Akuntabilitas Dan Trasparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi. Diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Nota Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, RAPBN 2020 s/d 2022

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 2018-2022

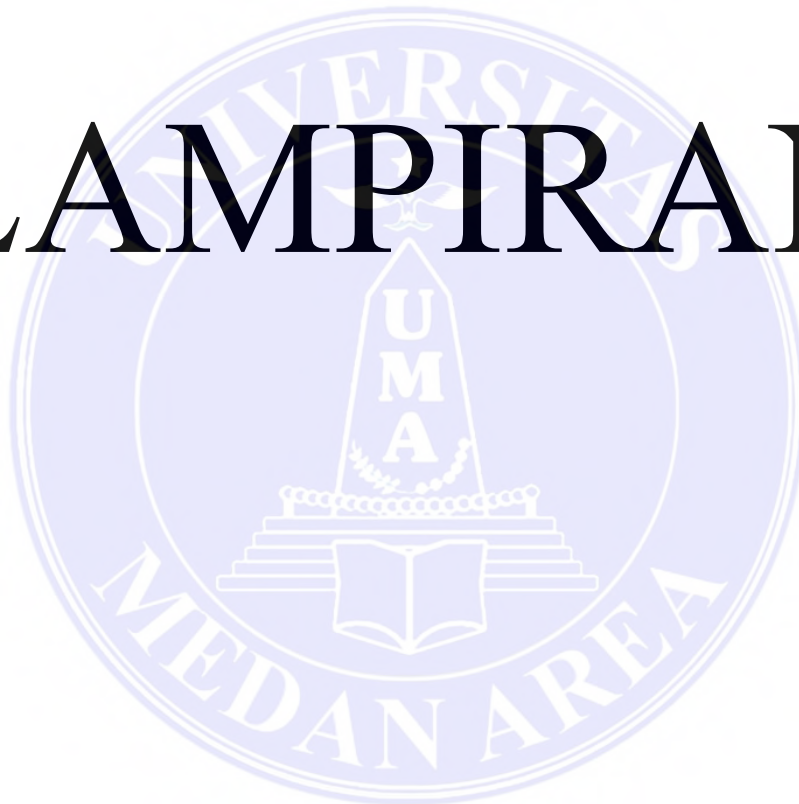
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 805 tahun 2018 tentang Tata cara pembagian dan penentuan rincian dan pedoman teknis penggunaan dana desa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020.



LAMPIRAN



Correlations

		item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	item_7	item_8	item_9	item_10	skor_total
item_1	Pearson Correlation	1	.331	.212	.546**	.568**	.319	.566**	.407*	.549**	.112	.660**
	Sig. (2-tailed)		.074	.261	.002	.001	.086	.001	.026	.002	.555	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_2	Pearson Correlation	.331	1	.074	.586**	.435*	.497**	.315	.150	.372*	.610**	.634**
	Sig. (2-tailed)	.074		.699	.001	.016	.005	.090	.428	.043	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_3	Pearson Correlation	.212	.074	1	.222	.132	.067	.299	.211	.331	.248	.381*
	Sig. (2-tailed)	.261	.699		.237	.488	.723	.109	.264	.074	.186	.038
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_4	Pearson Correlation	.546**	.586**	.222	1	.131	.420*	.745**	.509**	.696**	.368*	.756**
	Sig. (2-tailed)	.002	.001	.237		.491	.021	.000	.004	.000	.045	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_5	Pearson Correlation	.568**	.435*	.132	.131	1	.560**	.448*	.172	.422*	.515**	.637**
	Sig. (2-tailed)	.001	.016	.488	.491		.001	.013	.363	.020	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

item_6	Pearson Correlation	.319	.497**	.067	.420*	.560**	1	.564**	.690**	.527**	.538**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.086	.005	.723	.021	.001	.001	.001	.000	.003	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_7	Pearson Correlation	.566**	.315	.299	.745**	.448*	.564**	1	.683**	.935**	.422*	.872**
	Sig. (2-tailed)	.001	.090	.109	.000	.013	.001	.000	.000	.000	.020	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_8	Pearson Correlation	.407*	.150	.211	.509**	.172	.690**	.683**	1	.765**	.148	.693**
	Sig. (2-tailed)	.026	.428	.264	.004	.363	.000	.000	.000	.000	.436	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_9	Pearson Correlation	.549**	.372*	.331	.696**	.422*	.527**	.935**	.765**	1	.388*	.874**
	Sig. (2-tailed)	.002	.043	.074	.000	.020	.003	.000	.000	.000	.034	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_10	Pearson Correlation	.112	.610**	.248	.368*	.515**	.538**	.422*	.148	.388*	1	.632**
	Sig. (2-tailed)	.555	.000	.186	.045	.004	.002	.020	.436	.034	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
skor_total	Pearson Correlation	.660**	.634**	.381*	.756**	.637**	.759**	.872**	.693**	.874**	.632**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.038	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

uji validitas x2 transparansi dana desa

Correlations

		item 1	item 2	item 3	item 4	item 5	item 6	item 7	item 8	skor total
item_1	Pearson Correlation	1	.714**	.714**	.594**	.758**	.627**	.714**	.749**	.858**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_2	Pearson Correlation	.714**	1	1.000**	.478**	.925**	.935**	1.000**	.432*	.954**
	Sig. (2-tailed)	.000		0.000	.008	.000	.000	0.000	.017	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_3	Pearson Correlation	.714**	1.000**	1	.478**	.925**	.935**	1.000**	.432*	.954**
	Sig. (2-tailed)	.000	0.000		.008	.000	.000	0.000	.017	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_4	Pearson Correlation	.594**	.478**	.478**	1	.381*	.526**	.478**	.501**	.641**
	Sig. (2-tailed)	.001	.008	.008		.038	.003	.008	.005	.000

item_5	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.758**	.925**	.925**	.381*	1	.857**	.925**	.443*	.915**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.038	.000	.000	.000	.014	.000
item_6	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.627**	.935**	.935**	.526**	.857**	1	.935**	.368*	.909**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.046	.000
item_7	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.714**	1.000**	1.000**	.478**	.925**	.935**	1	.432*	.954**
	Sig. (2-tailed)	.000	0.000	0.000	.008	.000	.000	.000	.017	.000
item_8	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.749**	.432*	.432*	.501**	.443*	.368*	.432*	1	.633**
	Sig. (2-tailed)	.000	.017	.017	.005	.014	.046	.017	.000	.000
skor_total	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.858**	.954**	.954**	.641**	.915**	.909**	.954**	.633**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Correlations

Parulian Simaga - Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Kepercayaan....

		item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	item_7	item_8	item_9	item_10	item_11	item_12	skor_total
item_1	Pearson Correlation	1	.564**	.690**	.527**	.553**	.719**	.921**	.560**	.564**	.527**	.553**	.548**	.785**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.003	.002	.000	.000	.001	.001	.003	.002	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_2	Pearson Correlation	.564**	1	.683**	.935**	.462*	.701**	.467**	.993**	.732**	.935**	.462*	.971**	.918**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.010	.000	.009	.000	.000	.000	.010	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_3	Pearson Correlation	.690**	.683**	1	.765**	.185	.321	.749**	.675**	.818**	.765**	.185	.657**	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.328	.084	.000	.000	.000	.000	.328	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_4	Pearson Correlation	.527**	.935**	.765**	1	.432*	.641**	.572**	.925**	.800**	1.000**	.432*	.901**	.921**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000		.017	.000	.001	.000	.000	0.000	.017	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_5	Pearson Correlation	.553**	.462*	.185	.432*	1	.689**	.498**	.443*	.226	.432*	1.000**	.416*	.643**
	Sig. (2-tailed)	.002	.010	.328	.017		.000	.005	.014	.229	.017	0.000	.022	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_6	Pearson Correlation	.719**	.701**	.321	.641**	.689**	1	.624**	.691**	.414*	.641**	.689**	.704**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.084	.000	.000		.000	.000	.023	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_7	Pearson Correlation	.921**	.467**	.749**	.572**	.498**	.624**	1	.460*	.612**	.572**	.498**	.446*	.754**
	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.000	.001	.005	.000		.011	.000	.001	.005	.014	.000

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

item_8	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.560**	.993**	.675**	.925**	.443*	.691**	.460*	1	.766**	.925**	.443*	.962**	.912**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.014	.000	.011		.000	.000	.014	.000	.000
item_9	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.564**	.732**	.818**	.800**	.226	.414*	.612**	.766**	1	.800**	.226	.698**	.790**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.229	.023	.000	.000		.000	.229	.000	.000
item_10	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.527**	.935**	.765**	1.000**	.432*	.641**	.572**	.925**	.800**	1	.432*	.901**	.921**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	0.000	.017	.000	.001	.000	.000		.017	.000	.000
item_11	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.553**	.462*	.185	.432*	1.000**	.689**	.498**	.443*	.226	.432*	1	.416*	.643**
	Sig. (2-tailed)	.002	.010	.328	.017	0.000	.000	.005	.014	.229	.017		.022	.000
item_12	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.548**	.971**	.657**	.901**	.416*	.704**	.446*	.962**	.698**	.901**	.416*	1	.889**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.022	.000	.014	.000	.000	.000	.022		.000
skor_total	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.785**	.918**	.771**	.921**	.643**	.799**	.754**	.912**	.790**	.921**	.643**	.889**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas X1 akuntabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.881	10

Uji Reliabilitas X2 Transparansi Dana Desa

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.948	8

Uji Reliabilitas Y Kepercayaan Masyarakat

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.954	12

Deskriptif Responden

		Frequency	Percent
Valid	Laki-laki	16	53.3
	Perempuan	14	46.7
	Total	30	100.0

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.87829400
Most Extreme Differences	Absolute	.212
	Positive	.167
	Negative	-.212
Kolmogorov-Smirnov Z		1.163
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.830	1.711		-1.070	.294		
akuntabilitas	.329	.112	.223	2.943	.007	.110	9.058
transparansi dana desa	1.101	.107	.778	10.264	.000	.110	9.058

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.035	.996		1.040	.308		
akuntabilitas	-.061	.065	-.499	-.932	.359	.110	9.058
transparansi dana desa	.095	.062	.813	1.517	.141	.110	9.058

a. Dependent Variable: Abs_RES

4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.991 ^a	.983	.982	1.947	1.684

a. Predictors: (Constant), transparansi dana desa, akuntabilitas

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.830	1.711		-1.070	.294
akuntabilitas	.329	.112	.223	2.943	.007
transparansi dana desa	1.101	.107	.778	10.264	.000

a. Dependent Variable: kepercayaan masyarakat

Uji Hipotesis

1. Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.830	1.711		-1.070	.294
akuntabilitas	.329	.112	.223	2.943	.007
transparansi dana desa	1.101	.107	.778	10.264	.000

a. Dependent Variable: kepercayaan masyarakat

2. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5868.655	2	2934.328	774.368	.000 ^b
Residual	102.312	27	3.789		
Total	5970.967	29			

a. Dependent Variable: kepercayaan masyarakat

b. Predictors: (Constant), transparansi dana desa, akuntabilitas

3. Uji Koefisien Determinasi R²Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 ^a	.983	.982	1.947

a. Predictors: (Constant), transparansi dana desa, akuntabilitas

b. Dependent Variable: kepercayaan masyarakat

Item Pertanyaan	Bobot jawaban						Total Persen
	Sangat Tidak Setuju (SST)	Tidak Setuju (TS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)	Kurang Setuju (KS)	Total	
P1X1		6	1	23		30	100%
%		20%	3%	77%			
P2X1		11	2	17		30	100%
%		37%	6%	57%			
P3X1		5		25		30	100%
%		16,7%		83,3%			
P4X1		8		20	2	30	100%
%		27%		67%	6%		
P5X1		11		18	1	30	100%
%		37%		60%	3%		
P6X1		23		7		30	100%
%		77%		23%			
P7X1		14		16		30	100%
%		47%		53%			
P8X1		17		13		30	100%
%		57%		43%			
P9X1		13		17		30	100%
%		43%		57%			
P10X1		10	1	16	3	30	100%
%		34%	3%	53%	10%		

Item Pertanyaan	Bobot jawaban						Total Persen
	Sangat Tidak Setuju (SST)	Tidak Setuju (TS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)	Kurang Setuju (KS)	Total	
P1X2		18		12		30	100%
%		60%		40%			
P2X2		13		17		30	100%
%		43%		57%			
P3X2		13		17		30	100%
%		43%		57%			
P4X2		17		9	4	30	100%
%		57%		30%	13%		
P5X2		13		16	1	30	100%
%		43%		54%	3%		
P6X2		14		16		30	100%
%		47%		53%			
P7X2		13		17		30	100%
%		43%		57%			
P8X2		11		17	3	30	100%
%		37%		57%	10%		

Item Pertanyaan	Bobot jawaban						Total Persen
	Sangat Tidak Setuju (SST)	Tidak Setuju (TS)	Setuju (S)	Sangat Setuju	Kurang Setuju (KS)	Total	
P1Y1		22		8		30	100%
%		73%		27%			
P2Y1		14		16		30	100%
%		47%		53%			
P3Y1		16		14		30	100%
%		53%		47%			
P4Y1		13		17		30	100%
%		43%		57%			
P5Y1		11		16	3	30	100%
%		37%		53%	10%		
P6Y1		14		12	4	30	100%
%		47%		40%	13%		
P7Y1		21		9		30	100%
%		70%		30%			
P8Y1		13		16	1	30	100%
%		43%		54%	3%		
P9Y1		14		16		30	100%
%		47%		53%			
P10Y1		13		17		30	100%
%		43%		57%			
P11Y1		11		16	3	30	100%
%		37%		53%	10%		
P12Y1		13	1	16		30	100%
%		43%	3%	54%			

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berilah jawaban dengan tanda (√) pada setiap pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Nama :

Jenis Kelamin :

Perempuan

Laki-Laki

Umur :

<18 tahun

19-29 tahun

>30 tahun

Pertanyaan yang diajukan disediakan 5 pilihan jawaban dengan ketentuan skala sebagai berikut:

1. Sangat Setuju diberi Sekor 5 (SS)
2. Setuju diberi Sekor 4 (S)
3. Netral diberi Sekor 3 (RR)
4. Tidak Setuju diberi Sekor 2 (TS)
5. Sangat Setuju diberi Sekor 1 (STS)

A. Pertanyaan

1. Akuntabilitas

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
Pembuatan Keputusan di tulis Secara Tertulis						
1	Tahapan pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat					
2	Anggaran disajikan secara terbuka dan tertulis yang mudah dipahami masyarakat					

Akurasi dan Kelengkapan Informasi					
3	Angaran dana desa disajikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat				
4	Inforamsi dana desa dilaporkan dengan bukti-bukti yang dapat dipahami oleh masyarakat luas				
Kejelasan dari sasaran kebijakan dan dikomunikasikan					
5	Proses dan pertanggungjawaban dana desa dilaporkan secara priodik dan terus-menerus				
6	Penyajian dana desa telah menyertakan informasi masa lalu				
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Masa Dan Akses Publik					
7	Informasi diberikan secara terbuka kepada masyarakat				
8	Infomrasi disebarluaskan dalam bentuk pengumuman dalam pemanfaatan dana desa				
Sistem Informasi manajemen dan Monitoring Hasil					
9	Dalam mengevaluasi dana desa, hanya membandingkan target dengan realisasi/ sesungguhnya				
10	Dana desa dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan kepada masyarakat luas (horizontal)				

2. Transparansi Dana Desa

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
Ada Tidaknya Kerangka Kerja Hukum						
11	Adanya peraturan yang mengatur pengelolaan dana desa					
12	Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang dari pengelolaan dana desa					
Adanya Akses Masyarakat						
13	Adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses rencana dan pengalokasian dana desa					
14	Adanya sarana publikasi rencana dan pengalokasian dana desa					
Adanya Audit Yang Independent dan Efektif						
15	Masyarakat dapat memberikan kritik dan saran terhadap rencana dan anggaran pengalokasian dana desa					
16	Adanya satuan pengawasan yang melakukan pengawasan secara independent terhadap rencana dan anggaran pengalokasian dana desa					
Adanya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembuatan Keputusan Dana desa						
17	Masyarakat dilibatkan dalam rencana dan anggaran pengalokasian dana desa					
18	Adanya peran masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan laporan dana desa					

3. Kepercayaan Masyarakat

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
<i>Exhibiting Trust</i>						
19	Selama ini masyarakat mempercayakan kepemimpinan kepala desa					

20	Kepala desa dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat					
21	Masyarakat percaya kepada pelaksanaan dan mengelolahan dana desa					
<i>Acheving Reslust</i>						
22	Masyarakat percaya dengan program yang di ajukan oleh kepala desa					
23	Masyarakat mendukung setiap program yang dilaksanakan oleh kepada desa					
24	Masyarakat percaya bahwa kepada desa dapat menampung aspirasi masyarakat					
25	Masyarakat percaya dengan hasil kerja yang dilakukan oleh kepada desa					
<i>Acting With Integrity</i>						
26	Masyarakat percaya bahwa kepada desa terbuka dalam melakukan pengelolaan dana desa					
27	Masyarakat percaya kepala desa mampu bertanggung pada keja yang dilakukan					
28	Masyarkat percaya kepala desa tidak akan melakukan penyelewengan kekuasaannya sebagai kepala desa					
<i>Demonstration Concern</i>						
29	Apakah kepala desa mendengarkan/ menampung aspirasi/ masukkan dari masyarakat					
30	Apa program yang dibuat kepala desa mampu membantu membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya.					